

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Digitalisasi adalah bentuk bukti nyata bahwa manusia telah mengembangkan kemampuannya untuk menciptakan temuan yang dapat mempermudah aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Digitalisasi ini ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi yang saat ini sudah menyatu dengan kehidupan manusia sehari-hari. Banyaknya kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan dari implementasi digitalisasi tentu membuat kehidupan terasa lebih praktis (Danuri, 2019).

Revolusi industri merupakan salah satu gambaran dari adanya perkembangan teknologi yang memberikan dampak pada perekonomian dunia (Kagermann et al., 2013). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi memegang pengaruh yang cukup besar terkait dengan transformasi, khususnya dalam hal transaksi internasional. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, pemerintah menjalankan serangkaian perubahan untuk bisa mencapai *e-government*, yang

mana secara normatif instruksi presiden tersebut merupakan awal dari pengembangan *e-government* di Indonesia.

Kementerian Keuangan mengimplementasikannya untuk mewujudkan tercapainya kualitas dan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam Instruksi Presiden tersebut juga dijelaskan bahwa proses pengembangan *e-government* harus dilakukan selaras dengan memaksimalkan hubungan antara inisiatif dari masing-masing instansi dan penguatan kerangka kebijakan untuk menjamin keterpaduan dalam satu jaringan sistem manajemen dan proses kerja. *Integrated financial management information system* (IFMIS) merupakan salah satu bentuk penerapan *e-government* di Indonesia.

Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau disingkat dengan SAKTI merupakan suatu sistem aplikasi bagian dari IFMIS yang wajib digunakan oleh instansi maupun satuan kerja (satker) yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Pambudi & Adam (2018) dijelaskan bahwa berdasarkan persepsi dari pengguna aplikasi SAKTI, kesuksesan pengimplementasiannya telah membantu dalam meningkat produktivitas dan performa kerja penggunanya. Disamping itu, kecepatan dan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan akibat dari penggunaan SAKTI dapat membantu dalam melakukan proses pengambilan keputusan.

Membahas terkait pengelolaan pengeluaran kas tentu tidak terlepas dari proses pembayaran, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, disebutkan bahwa “Modul pembayaran adalah bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk pengajuan pembayaran atas beban APBN,

pengesahan pendapatan dan belanja, dan pencatatan surat perintah pencairan dana”. Meninjau dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Modul Pembayaran dalam Piloting SAKTI, dijelaskan bahwa modul pembayaran merupakan modul yang memproses pencatatan SPP (surat permintaan pembayaran), penerbitan SPM (surat perintah membayar), pencatatan penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana), pencatatan RPD (rencana penarikan dana harian), *monitoring* pengiriman ADK SPM (arsip data komputer SPM), serta koreksi belanja dan penyesuaian pagu pada DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran).

Sebelum melakukan proses pada modul pembayaran, satker perlu mendaftarkan *supplier* atau pihak yang menerima pembayaran terlebih dahulu pada modul komitmen sebagai acuan dalam melakukan pembayaran. Dalam Peraturan DJPb Nomor PER-38/PB/2018, diperjelas bahwa satker dapat melakukan manajemen data *supplier* pada modul komitmen, yang terdiri atas pembuatan dan pendaftaran data *supplier*, perubahan data *supplier*, serta penonaktifan data *supplier*.

Berdasarkan Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta tahun 2020 dipaparkan bahwa persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI di KPPN Yogyakarta mencapai 100%, persentase tersebut diukur berdasarkan pencapaian atas tahapan kegiatan penerapan SAKTI yang telah ditentukan pada periode semester I dan II secara tepat waktu serta tercapainya jumlah satker yang telah menerapkan SAKTI.

Dalam Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta tersebut juga dijelaskan bahwa akurasi penyaluran SP2D dan kecepatan penyelesaian retur SP2D merupakan alat

ukur untuk menilai indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas di KPPN. Penyaluran dana SP2D yang akurat artinya, penyaluran SP2D kepada *supplier* yang telah sesuai dan berhasil diterima, sedangkan kecepatan penyelesaian retur oleh KPPN merupakan usaha untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN secara tepat waktu, tepat jumlah, dan juga tepat penerima. Berdasarkan laporan kinerja tersebut menunjukkan bahwa target dari indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas tahun 2020 adalah 3 dari skala 4, sedangkan realisasinya menunjukkan angka 3,87. Itu artinya, realisasi dari indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas di KPPN Yogyakarta mencapai 129% dari target yang sudah ditentukan, sedangkan berdasarkan Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta tahun 2021 realisasi indeksnya mencapai angka 4 dari target 3,15. Indeks tersebut merupakan indikator kinerja utama (IKU) baru yang pertama kali muncul pada Laporan Kinerja KPPN Tahun 2020.

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul “Manajemen Risiko Keamanan Informasi pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan” diberikan penjelasan bahwa aplikasi SAKTI dan SPAN mengambil peran penting dalam pengelolaan APBN. Tidak berjalannya aplikasi SAKTI dapat berisiko terhadap tidak cairnya dana APBN. Dikarenakan hal tersebut, SAKTI harus memiliki perangkat manajemen risiko untuk menjamin ketersediaan layanan SAKTI karena ketersediaan informasi dalam SAKTI sangat penting kaitanya terutama dalam hal pengeluaran kas (Supristiowadi & Sucahyo, 2018). Di sisi lain, penelitian terkait retur SP2D juga telah dijelaskan pada jurnal dengan judul “Akselerasi Penyelesaian Dana Retur SP2D: Studi Kasus Pada Kantor Bayar KPPN

Jakarta V”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa untuk mengurangi adanya retur SP2D, satuan kerja harus meningkatkan ketelitian dalam mendaftarkan serta memperbarui data *supplier*. Penyelesaian retur dapat berjalan dengan baik jika didukung dengan prosedur penerbitan SP2D yang benar. Keandalan dari KPPN dan satuan kerja sangat diperlukan dalam rangka mempercepat penyelesaian retur tersebut (Sumantri et al., 2017). Berangkat dari kedua jurnal tersebut, dalam penelitian ini peneliti ingin menjadikan kedua bahasan mengenai SAKTI dan retur SP2D menjadi satu kesatuan pembahasan untuk melihat hubungan dari keduanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh penerapan aplikasi SAKTI terhadap tingginya indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas di KPPN Yogyakarta yang dinilai berdasarkan akurasi SP2D dan kecepatan penyelesaian retur SP2D. Penelitian ini mencoba menggali apakah SAKTI memiliki pengaruh dalam tercapainya kesuksesan indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas di KPPN Yogyakarta. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti mencoba meninjau jumlah retur dari satker yang telah menggunakan aplikasi SAKTI di wilayah kerja KPPN Yogyakarta untuk dibandingkan dengan indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas pada Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta tahun 2020 dan 2021. Hasil tinjauan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN DIGITALISASI PEMBAYARAN SAKTI TERHADAP INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENGELUARAN KAS DI KPPN YOGYAKARTA”. Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan wawasan yang dapat diambil oleh pembaca serta dapat

menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai implementasi SAKTI maupun indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas khususnya terkait retur SP2D.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perumusan masalah dari karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan digitalisasi pembayaran SAKTI dalam meningkatkan akurasi penyaluran dana SP2D?
2. Bagaimana penerapan digitalisasi pembayaran SAKTI dalam mengurangi retur SP2D?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan penerapan digitalisasi pembayaran SAKTI dalam meningkatkan indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas di KPPN Yogyakarta?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya tulis tugas akhir ini antara lain:

1. Mengidentifikasi penerapan digitalisasi pembayaran SAKTI dalam meningkatkan akurasi penyaluran dana SP2D.
2. Mengidentifikasi penerapan digitalisasi pembayaran SAKTI dalam mengurangi retur SP2D.
3. Merumuskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan digitalisasi pembayaran SAKTI dalam meningkatkan indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas di KPPN Yogyakarta.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan karya tulis tugas akhir ini menitikberatkan pada pengaruh penerapan digitalisasi pembayaran SAKTI terhadap tingginya indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas di KPPN Yogyakarta. Peneliti melakukan pembatasan pada ruang lingkup penelitian KTTA meliputi akurasi penyaluran dana SP2D dan pengurangan retur SP2D dari satuan kerja yang telah menerapkan aplikasi SAKTI di wilayah kerja KPPN Yogyakarta untuk selanjutnya disandingkan dengan indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas pada Laporan Kinerja KPPN Yogyakarta.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat membawa manfaat antara lain:

1. Menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh penerapan digitalisasi pembayaran pada modul SAKTI terhadap tingginya indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas di KPPN Yogyakarta.
2. Menjadi informasi tambahan bagi instansi objek KTTA dalam rangka evaluasi terkait penerapan digitalisasi pembayaran pada modul SAKTI dan peningkatan IKU terkait indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas.
3. Menjadi bahan literasi bagi masyarakat umum mengenai penerapan digitalisasi pembayaran pada modul SAKTI serta indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas di KPPN Yogyakarta yang meliputi akurasi SP2D dan kecepatan penyelesaian retur SP2D.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

Karya tulis tugas akhir ini terdiri dari empat bab, setiap bab terdiri dari subbab-subbab dengan urutan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diberikan penjabaran terkait gambaran umum dari karya tulis tugas akhir yang disusun peneliti. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat dari penulisan, serta sistematika dari penulisan KTTA yang akan dituangkan dalam beberapa bab.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan diberikan penjelasan terkait dasar hukum, teori, serta kajian terdahulu yang meliputi pengelolaan kas, aplikasi SAKTI, proses bisnis modul komitmen dan modul pembayaran pada aplikasi SAKTI, serta indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas. Landasan teori tersebut akan menjadi dasar untuk peneliti dalam merumuskan pembahasan dan menarik kesimpulan.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diberikan uraian terkait metode penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, gambaran umum objek penulisan, serta pembahasan hasil. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara, sedangkan untuk metode pengolahan data menggunakan SWOT dan ATLAS.ti. Pada bagian gambaran umum objek penelitian akan diberikan penjelasan terkait gambaran umum objek penelitian yaitu KPPN Yogyakarta yang

terdiri atas sejarah singkat, visi, misi, moto, wilayah kerja, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi.

Pada bagian pembahasan hasil akan dijelaskan terkait penerapan aplikasi SAKTI dalam meningkatkan akurasi SP2D di KPPN Yogyakarta, penerapan aplikasi SAKTI dalam mengurangi retur SP2D, dan faktor-faktor keberhasilan penerapan SAKTI dalam meningkatkan indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas di KPPN Yogyakarta.

#### BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam karya tulis tugas akhir ini. Kesimpulan yang ditarik merupakan rangkuman dari semua informasi yang diperoleh dari penelitian ini serta menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Penulis juga akan memberikan saran baik untuk pihak satker maupun KPPN guna mendukung peningkatan indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas serta mendukung keberhasilan dari penerapan aplikasi SAKTI.